

**STRATEGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DALAM DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Rio Marcelino

NPP. 32.0738

Asdaf Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0738@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Fitri Rahmadany M., S.IP., M.Tr.IP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The digitalization of regional financial management is a crucial part of bureaucratic reform and public administration modernization. The Government of Barito Selatan Regency, through the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), has implemented various digital systems such as SIPD, SIMDA, and supporting applications to create efficient, transparent, and accountable financial management. However, this implementation still faces several challenges, including limited infrastructure, gaps in human resource (HR) competencies, and suboptimal integration of digital systems.* **Purpose:** *This study aims to analyze BPKAD's strategy in implementing digitalization for regional financial management in Barito Selatan Regency, as well as identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) faced in the digital transformation process.* **Method:** *This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted through in-depth interviews with BPKAD leaders and staff, direct observation of digitalization activities, and documentation of policies and financial systems used. Data analysis was performed using SWOT analysis to formulate strategies for strengthening regional financial digitalization.* **Result:** *The study reveals that BPKAD has strengths in technological readiness, competent HR, and regional policy support, but still faces challenges such as suboptimal infrastructure, uneven digital literacy among employees, and difficulties in system integration and internal resistance to change. Externally, opportunities arise from national regulations and potential strategic collaborations, while threats such as cybersecurity risks and budget constraints must be anticipated.* **Conclusion:** *BPKAD's digitalization strategy is positioned aggressively (SWOT Quadrant I), requiring the optimization of internal strengths to seize external opportunities. Key recommendations include enhancing HR capacity, strengthening system security, expanding external collaborations, and implementing more integrated and adaptive technological systems.*

Keywords: *Strategy, Digitalization, Regional Financial Management, SWOT*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi publik. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah mengimplementasikan berbagai sistem digital seperti SIPD, SIMDA, dan aplikasi pendukung lainnya dalam upaya menciptakan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, implementasi ini masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kompetensi SDM, serta belum optimalnya integrasi sistem digital secara menyeluruh. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi BPKAD dalam mengimplementasikan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barito Selatan, serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam proses transformasi digital tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan dan staf BPKAD, observasi langsung terhadap aktivitas digitalisasi, serta dokumentasi kebijakan dan sistem keuangan yang digunakan. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis SWOT untuk merumuskan strategi penguatan digitalisasi keuangan daerah. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD memiliki kekuatan pada kesiapan teknologi, SDM yang kompeten, dan dukungan kebijakan daerah, namun masih dihadapkan pada kendala infrastruktur yang belum optimal, ketimpangan literasi digital pegawai, serta tantangan dalam integrasi sistem dan resistensi internal terhadap perubahan. Dari sisi eksternal, peluang datang dari regulasi nasional dan potensi kolaborasi strategis, namun ancaman seperti keamanan siber dan keterbatasan anggaran tetap harus diantisipasi. **Kesimpulan:** Strategi digitalisasi BPKAD Kabupaten Barito Selatan berada pada posisi agresif (kuadran I SWOT), yang menuntut pemanfaatan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal secara optimal. Rekomendasi utama adalah penguatan kapasitas SDM, peningkatan keamanan sistem, perluasan kolaborasi eksternal, dan penerapan sistem yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika teknologi.

Kata kunci: Strategi, Digitalisasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, SWOT

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam konteks otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan secara mandiri. Christia & Ispriyarso (dalam Bahasoan dkk., 2024) menyampaikan bahwa tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan daerah. Namun, selain meningkatkan partisipasi masyarakat, otonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Muhlisin dkk. (2025) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal sering kali tidak berbanding lurus dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah. Salah

satu bentuk penguatan tata kelola tersebut diwujudkan melalui digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Digitalisasi ini mencakup penggunaan sistem informasi keuangan berbasis elektronik, seperti SIPD-RI, yang memfasilitasi proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan secara real-time. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran, dan mempercepat akses informasi oleh publik. Namun demikian, dalam implementasinya, pemerintah daerah seperti Kabupaten Barito Selatan masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi ASN, serta resistensi terhadap perubahan sistem manual ke digital.

Penggunaan sistem digital dalam pemerintahan terbukti berpengaruh positif, seperti dalam studi *e-Filing*, *e-SAMSAT*, dan insentif bagi pengemudi ojek daring di Jakarta, yang menekankan kemudahan, efisiensi, dan keamanan sebagai kunci keberhasilan (Cahyani dkk., 2024). Lebih dari itu, keberhasilan layanan digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan keadilan. Studi di sektor kesehatan Mesir menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut saling terkait dan berdampak signifikan terhadap kualitas tata kelola (Zeini dan Okasha, 2025). Dukungan regulasi dan pengawasan juga memainkan peran penting dalam menjamin akuntabilitas sistem. Dalam konteks keuangan Islam, praktik tata kelola dan audit yang kuat terbukti mampu meningkatkan transparansi keuangan, dengan efektivitas yang sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi (Jaradat dan Oudat, 2025).

Sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, BPKAD Kabupaten Barito Selatan menjadi garda terdepan dalam transformasi digital ini. Melalui penerapan regulasi daerah seperti Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020, BPKAD diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh proses keuangan dalam satu sistem elektronik yang terpadu. Namun, capaian digitalisasi tersebut belum sepenuhnya optimal akibat hambatan internal dan eksternal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi BPKAD dalam menghadapi tantangan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barito Selatan. Dengan pendekatan analisis SWOT, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam proses digitalisasi, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Pemerintahan daerah yang efektif, akan melahirkan prakarsa-prakarsa untuk perbaikan administrasi pemerintahan yang pada gilirannya memperkuat pembangunan ekonomi daerah (Azikin, 2018)

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian sebelumnya umumnya lebih menitikberatkan pada aspek pelaporan keuangan dan kepatuhan regulasi dengan pendekatan kuantitatif, serta belum banyak yang secara khusus mengkaji strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan daerah secara mendalam. Kajian mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan digitalisasi, seperti

kesiapan infrastruktur, kompetensi SDM, serta resistensi budaya organisasi terhadap perubahan teknologi, juga masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan kualitatif dan analisis SWOT, guna mengevaluasi strategi digitalisasi BPKAD di Kabupaten Barito Selatan secara komprehensif dan kontekstual.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu guna menunjukkan relevansi dan kebaruan topik yang diangkat. Avisha dkk. (2023) meneliti pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas di BPKAD Kabupaten Bogor dengan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik deskriptif serta uji regresi linear berganda. Husna dkk. (2022) dalam penelitiannya di Kabupaten Aceh Besar juga menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji pengaruh kompetensi keuangan dan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, menyoroti pentingnya SDM dalam tata kelola keuangan daerah. Evangelista (2021) menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis kinerja BPKAD dalam peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Lombok Barat, yang menjadi relevan karena pendekatan ini serupa dengan penelitian yang dilakukan penulis. Sementara itu, Paensi dkk. (2023) mengevaluasi penggunaan aplikasi E-Sumsel di Provinsi Sumatera Selatan dengan pendekatan kuantitatif untuk menilai kepuasan pegawai terhadap sistem digital. Slamet dan Irmadiani (2022) meneliti pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan di BPKAD Kabupaten Bogor, juga dengan metode kuantitatif. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang umumnya berfokus pada kualitas laporan keuangan dan tingkat kepuasan, penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dan mengangkat strategi digitalisasi secara menyeluruh di Kabupaten Barito Selatan, dengan menggunakan analisis SWOT untuk menggali faktor internal dan eksternal yang memengaruhi digitalisasi. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dalam literatur yang belum banyak membahas strategi digitalisasi keuangan daerah secara komprehensif dari perspektif kelembagaan dan manajerial.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus mengkaji strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengimplementasikan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barito Selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis SWOT. Berbeda dengan Avisha dkk. (2023), Husna dkk. (2022), serta (Slamet dan Irmadiani, 2022) yang menggunakan metode kuantitatif dan fokus pada pengaruh sistem akuntansi atau kualitas laporan keuangan, penelitian ini menyoroti secara menyeluruh faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan digitalisasi, termasuk infrastruktur teknologi, kompetensi SDM, serta dinamika budaya organisasi. Selain itu, lokasi penelitian ini juga memiliki kekhususan karena belum banyak kajian yang menelaah implementasi digitalisasi keuangan secara mendalam di Kabupaten Barito Selatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur manajemen keuangan publik,

khususnya dalam merumuskan strategi kelembagaan yang adaptif terhadap transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Sugiyono (dalam Ardiansyah dkk., 2023), menjelaskan bahwa metode kualitatif berbasis filsafat *postpositivisme* digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alamiah, berbeda dengan pendekatan eksperimen. Simangunsong (2016), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat fleksibel, memungkinkan desain penelitian disesuaikan dengan fenomena yang muncul di lapangan. penelitian kualitatif. Penelitian ini sebagaimana dijelaskan Nasution (dalam Hikmawanti, 2020), menegaskan bahwa manusia harus menjadi instrumen utama serta didukung dengan instrumen penunjang lainnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan model wawancara semistruktur. Moleong (Suwartono, 2014) menyebutnya dengan istilah wawancara berdasar petunjuk umum. Wawancara semistruktur dilakukan sebagai upaya menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat BPKAD Kabupaten Barito Selatan, seperti Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala Bidang, serta aparatur pelaksana teknis yang terlibat dalam sistem digital. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), untuk merumuskan strategi yang relevan dalam mendukung transformasi digital BPKAD. Pendekatan ini digunakan agar peneliti memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi internal dan eksternal organisasi dalam mengimplementasikan digitalisasi keuangan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strengths/ Kekuatan

Penelitian ini menggunakan tiga indikator utama untuk menilai kekuatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan dukungan kebijakan. Ketiga aspek ini dinilai sebagai pilar utama dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui pendekatan digital.

Salah satu kekuatan yang paling menonjol adalah penerapan sistem teknologi seperti SIMDA, SIPD, serta aplikasi pendukung seperti e-Budgeting dan SISMEOP (e-Monitoring) yang telah membantu meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam proses perencanaan hingga pelaporan anggaran. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan menegaskan manfaat dari sistem ini dengan menyatakan,

"Dengan adanya SIMDA, setiap transaksi keuangan dapat dipantau secara real-time, sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalisir. Selain itu, proses administrasi keuangan yang sebelumnya memerlukan banyak dokumen fisik kini bisa dilakukan secara digital, sehingga lebih cepat dan efisien."

Dari aspek sumber daya manusia, pegawai BPKAD telah mendapatkan pelatihan rutin dalam pengoperasian sistem informasi keuangan. Kemampuan ini dinilai penting dalam memastikan sistem berjalan optimal dan berkelanjutan. Kepala Sub Bagian BPKAD menyampaikan,

"Sebagian besar pegawai telah mengikuti pelatihan terkait sistem informasi keuangan daerah, sehingga mereka mampu mengoperasikan sistem ini dengan baik. Kami juga memiliki tim yang bertugas untuk memastikan bahwa setiap kendala teknis dapat segera ditangani, sehingga proses pengelolaan keuangan tetap berjalan lancar."

Pandangan ini diperkuat oleh seorang staf operator BPKAD yang mengatakan:

"Dalam keseharian, teknologi digital sangat mempermudah proses kerja kami, terutama dalam pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan. Sistem ini juga memungkinkan kami mengakses data secara real-time, sehingga koordinasi antarbidang menjadi lebih efisien."

Aspek kebijakan juga memainkan peran penting dalam mendukung proses digitalisasi ini. Dukungan pemerintah daerah melalui regulasi dan penganggaran memastikan bahwa sistem digital yang digunakan memiliki dasar hukum dan pendanaan yang memadai. Kepala Bidang BPKAD menyoroti hal ini dengan menyatakan:

"Regulasi yang ada memberikan landasan hukum yang jelas bagi implementasi sistem keuangan digital, sementara alokasi anggaran yang memadai memungkinkan kami untuk terus meningkatkan infrastruktur serta kapasitas SDM dalam mengoperasikan sistem yang ada."

Berdasarkan kutipan wawancara dan hasil observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Barito Selatan memiliki kekuatan yang cukup solid dalam hal kesiapan teknologi, kompetensi SDM, dan dukungan kebijakan. Ketiga aspek ini telah mendorong terwujudnya proses digitalisasi yang lebih cepat, efisien, dan terukur. Meski demikian, penguatan berkelanjutan terhadap kapasitas pegawai serta pembaruan sistem teknologi masih diperlukan agar transformasi digital ini dapat terus menjawab tantangan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks dan dinamis.

3.2. *Weakness/ Kelemahan*

Penelitian ini mengungkap tiga kelemahan yang menjadi tantangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Selatan dalam menerapkan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, serta hambatan dalam integrasi sistem. Ketiga aspek ini secara signifikan mempengaruhi efektivitas transformasi digital yang bertujuan menciptakan tata kelola keuangan yang efisien dan transparan.

Infrastruktur teknologi menjadi kendala paling mendasar dalam implementasi sistem digital. Meskipun SIPD telah menggantikan SIMDA sebagai sistem utama, berbagai masalah teknis masih sering muncul. Kepala BPKAD mengakui,

"Kami sering mengalami gangguan server dan ketidakstabilan jaringan internet, terutama saat periode pelaporan keuangan dimana akses sistem meningkat drastis."

Kendala ini diperparah dengan kapasitas penyimpanan data yang terbatas dan spesifikasi perangkat komputer yang belum memadai di beberapa unit kerja. Seorang staf operator menambahkan,

"Bekerja dengan SIPD menjadi cukup sulit ketika perangkat yang digunakan tidak mendukung dan koneksi internet lambat, padahal kami harus menginput data dalam jumlah besar."

Aspek sumber daya manusia juga menjadi titik lemah yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun pelatihan telah dilaksanakan, kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem digital masih belum merata. Kepala Sub Bagian BPKAD menjelaskan,

"Adaptasi teknologi di kalangan pegawai berjalan berbeda-beda. Masih ada yang kesulitan dan bergantung pada rekan yang lebih mahir, sehingga menciptakan ketidakefisienan dalam proses kerja."

Ketergantungan pada individu tertentu yang menguasai sistem secara mendalam justru menciptakan kerentanan dalam kelancaran operasional. Integrasi sistem menjadi tantangan kompleks lainnya dalam proses digitalisasi ini. Kepala Bidang BPKAD Barito Selatan menyoroti:

"Kami masih menghadapi masalah sinkronisasi data antara SIPD dengan aplikasi pendukung lainnya. Tidak jarang kami harus melakukan verifikasi ulang atau bahkan input manual karena format data yang tidak seragam."

Hal ini bertolak belakang dengan tujuan awal digitalisasi yang seharusnya mampu menyederhanakan dan mempercepat alur kerja. Dukungan teknis yang masih bergantung pada pihak eksternal juga seringkali menyebabkan penanganan masalah menjadi lebih lambat dari yang diharapkan.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Barito Selatan masih menghadapi tantangan berat dalam transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Ketiga aspek kelemahan - infrastruktur, SDM, dan integrasi sistem - saling berkaitan dan perlu ditangani secara komprehensif. Tanpa perbaikan menyeluruh di ketiga bidang tersebut, upaya digitalisasi berisiko hanya menjadi perubahan kosmetik tanpa memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pembenahan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, serta penyempurnaan integrasi sistem harus menjadi prioritas untuk mewujudkan transformasi digital yang benar-benar berdampak positif.

3.3. Opportunities/ Peluang

Penelitian ini mengidentifikasi tiga peluang strategis yang dapat dimanfaatkan BPKAD Kabupaten Barito Selatan dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, yaitu dukungan regulasi pemerintah, kolaborasi dengan pihak eksternal, dan adopsi teknologi mutakhir. Ketiga aspek ini membentuk ekosistem pendukung yang kuat untuk menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Dukungan regulasi menjadi landasan utama dalam percepatan digitalisasi. Kepala BPKAD menyatakan, "Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perbup Nomor 24 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas bagi transformasi digital kami." Regulasi ini tidak hanya memandu implementasi sistem digital, tetapi juga menjamin alokasi anggaran dan standarisasi proses. Kepala Sub Bagian menambahkan, "Dengan payung hukum yang kuat, koordinasi antarinstansi menjadi lebih terstruktur dan terukur."

Peluang kedua terletak pada potensi kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Universitas-universitas ternama seperti UGM dan Unlam dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan kapasitas SDM dan riset sistem. Sementara itu, kemitraan dengan perusahaan teknologi seperti GoPay dan DANA dapat mempercepat modernisasi infrastruktur. "Kerja sama dengan akademisi dan pelaku industri teknologi akan membuka akses terhadap inovasi terbaru dan solusi khusus untuk kebutuhan daerah kami," jelas Kepala Bidang BPKAD.

Perkembangan teknologi mutakhir menawarkan peluang transformasi yang lebih mendalam. Kepala BPKAD mengungkapkan antusiasmenya terhadap potensi *big data analytics*. Beliau menyampaikan

"Teknologi ini memungkinkan kami melakukan analisis anggaran berbasis data secara real-time, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih tepat dan cepat."

Cloud computing dan *blockchain* juga dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan keamanan dan transparansi data keuangan. Seorang staf operator menambahkan:

"Integrasi sistem otomatis untuk pelaporan keuangan akan sangat membantu mengurangi beban kerja manual dan meminimalkan kesalahan input."

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Barito Selatan memiliki peluang besar untuk melakukan lompatan dalam digitalisasi keuangan daerah. Trilogi dukungan regulasi, kolaborasi strategis, dan adopsi teknologi membentuk kerangka penguatan yang komprehensif. Namun, optimalisasi peluang ini memerlukan langkah konkret berupa perencanaan strategis yang matang, komitmen anggaran berkelanjutan, serta pembangunan kapasitas SDM secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan ketiga peluang ini secara sinergis, transformasi digital pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai hasil yang lebih maksimal dan berkelanjutan.

3.4. Threats/ Ancaman

Penelitian ini mengidentifikasi empat ancaman utama yang berpotensi menghambat implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Barito Selatan,

yaitu kerentanan keamanan siber, keterbatasan anggaran, ketergantungan pada pihak eksternal, dan resistensi perubahan internal. Tantangan-tantangan ini jika tidak dikelola dengan baik dapat mengurangi efektivitas transformasi digital dan bahkan menciptakan risiko baru dalam tata kelola keuangan daerah.

Ancaman keamanan siber muncul sebagai tantangan paling kritis dalam era digitalisasi. Kepala BPKAD menyatakan, "Kami sangat menyadari kerentanan sistem kami terhadap potensi peretasan dan kebocoran data keuangan yang bersifat sensitif."

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai tulang punggung digitalisasi menghadapi risiko serangan siber yang dapat mengancam integritas data keuangan daerah. Kepala Bidang menambahkan,

"Kami sedang mengembangkan sistem enkripsi data dan audit keamanan berkala untuk meminimalkan celah keamanan ini."

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan struktural yang signifikan. Meskipun digitalisasi menjadi program prioritas, alokasi dana untuk pengembangan infrastruktur, pelatihan SDM, dan pemeliharaan sistem seringkali tidak memadai. Kepala Sub Bagian mengungkapkan,

"Anggaran yang tersedia saat ini hanya memungkinkan kami untuk melakukan pembaruan sistem secara bertahap, padahal kebutuhan pengembangan jauh lebih besar."

Kondisi ini berpotensi memperlambat laju transformasi digital yang idealnya harus berjalan cepat.

Ketergantungan berlebihan pada pihak eksternal menciptakan kerentanan operasional. Kepala BPKAD menjelaskan,

"Sebagai sistem yang dikelola pusat, kami sering harus menunggu lama ketika terjadi gangguan pada SIPD."

Ketergantungan ini tidak hanya terjadi pada level sistem, tetapi juga dalam hal dukungan teknis dan pemeliharaan. Seorang staf operator mengeluhkan:

"Ketika terjadi masalah teknis, kami harus menunggu tim dari pusat yang kadang membutuhkan waktu sehari-hari untuk memperbaikinya."

Resistensi perubahan di kalangan pegawai merupakan tantangan kultural yang tidak boleh diabaikan. Kepala Sub Bagian mengakui bahwa:

"Tidak semua pegawai mampu beradaptasi dengan cepat, terutama yang sudah lama terbiasa dengan sistem manual."

Resistensi ini muncul dari berbagai faktor mulai dari ketakutan akan perubahan, kurangnya kompetensi digital, hingga kenyamanan dengan sistem lama. Untuk mengatasi ini, BPKAD telah menerapkan program mentoring dimana pegawai yang lebih melek digital membantu rekan-rekannya yang masih kesulitan.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap digitalisasi keuangan daerah bersifat multidimensi, mencakup aspek teknis, finansial, operasional, dan kultural. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan komprehensif yang meliputi: (1) penguatan sistem keamanan siber melalui enkripsi data dan audit berkala, (2) advokasi untuk peningkatan alokasi anggaran digitalisasi, (3) pengembangan kapasitas internal untuk mengurangi ketergantungan pada vendor eksternal, serta (4) program transformasi budaya organisasi yang berkelanjutan. Dengan strategi mitigasi yang tepat, berbagai ancaman ini dapat dikelola tanpa menghambat laju transformasi digital yang telah dirintis.

3.5. Analisis SWOT

a. Analisis *Internal Factor Analysis Summary*

Tabel 1. Analisis *Internal Factor Analysis Summary*

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor Tertimbang
Kekuatan (Strengths)			
Keunggulan yang dimiliki BPKAD dalam menerapkan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah	0,2	4	0,8
Teknologi digital yang sudah ada	0,15	3	0,45
Sumber daya yang menjadi kekuatan utama	0,15	3	0,45
Subtotal Kekuatan	0,5		1,7
Kelemahan (Weaknesses)			
Kendala internal utama yang dihadapi	0,2	2	0,4
Kesiapan SDM dalam mendukung penerapan sistem digital	0,15	1	0,15
Infrastruktur yang masih kurang memadai	0,15	1	0,15
Subtotal Kelemahan	0,5		0,7
Total	1		2,4

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan analisis *IFAS (Internal Factor Analysis Summary)*, BPKAD Kabupaten Barito Selatan menunjukkan posisi internal yang cukup kuat dalam mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dengan total skor tertimbang 2,40, melampaui nilai rata-rata 2,25. Kekuatan utama organisasi terletak pada keunggulan penerapan digitalisasi yang memberikan kontribusi signifikan dengan skor tertimbang 0,80, didukung oleh ketersediaan teknologi digital dan sumber daya yang memadai. Namun demikian, analisis juga mengungkap adanya kelemahan internal yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait kendala operasional yang hanya meraih skor 0,40. Ketika dilihat lebih mendalam, selisih positif 1,00 antara subtotal skor kekuatan (1,70) dan kelemahan (0,70) menunjukkan bahwa modal internal BPKAD lebih didominasi oleh faktor pendukung dibanding penghambat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, BPKAD memiliki kapasitas yang memadai untuk melanjutkan transformasi digital, meskipun tetap perlu menyikapi secara serius berbagai tantangan internal yang ada, khususnya dalam aspek kesiapan

SDM dan kecukupan infrastruktur pendukung, agar proses digitalisasi dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

b. Analisis *External Factor Analysis Summary*

Table 2. Analisis *External Factor Analysis Summary*

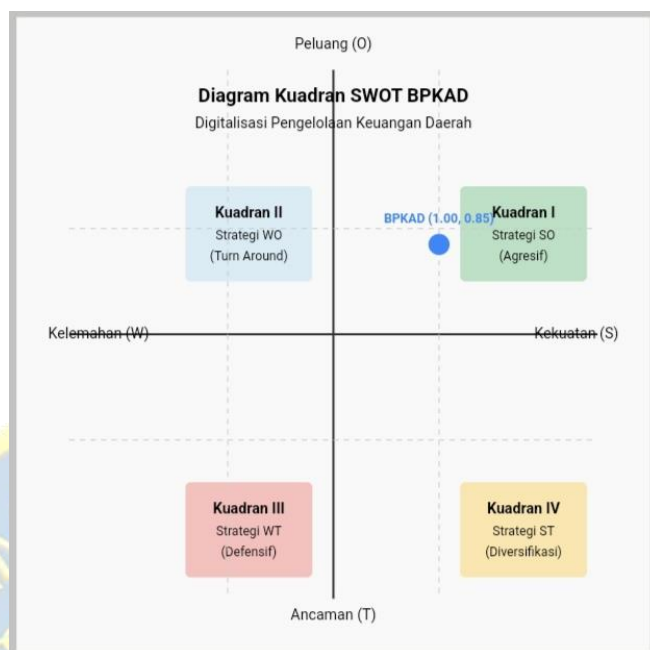
Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor Tertimbang
Peluang (Opportunities)			
Regulasi yang mendukung digitalisasi	0,2	4	0,8
Peluang untuk kolaborasi dengan pihak eksternal	0,15	3	0,45
Potensi perkembangan teknologi ke depan	0,15	3	0,45
Subtotal Peluang	0,5		1,7
Ancaman (Threats)			
Tantangan eksternal yang dapat menghambat	0,2	2	0,4
Pegawai yang sulit beradaptasi	0,15	2	0,3
Keamanan data atau risiko terkait	0,15	1	0,15
Subtotal Ancaman	0,5		0,85
Total	1		2,55

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan hasil analisis faktor eksternal, BPKAD Kabupaten Barito Selatan berhasil mencapai total skor tertimbang sebesar 2,55, yang berada di atas nilai rata-rata 2,25. Hal ini menunjukkan kemampuan organisasi yang cukup baik dalam memanfaatkan peluang eksternal sekaligus memitigasi berbagai ancaman dalam proses digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Peluang paling signifikan berasal dari dukungan regulasi pemerintah yang memberikan kontribusi besar dengan skor tertimbang 0,80, sementara tantangan eksternal menjadi faktor penghambat utama dengan skor 0,40.

Secara lebih rinci, selisih positif sebesar 0,85 antara subtotal skor peluang (1,70) dan ancaman (0,85) mengindikasikan bahwa lingkungan eksternal saat ini lebih banyak memberikan kemudahan daripada hambatan bagi BPKAD. Kondisi yang menguntungkan ini membuka ruang strategis bagi organisasi untuk lebih agresif dalam menyusun kebijakan dan mengimplementasikan program-program pengembangan sistem digital yang lebih komprehensif, dengan memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia sekaligus secara cermat mengantisipasi potensi ancaman yang mungkin muncul.

Setelah melakukan analisis faktor internal dan eksternal, langkah selanjutnya adalah menentukan posisi strategis BPKAD dalam kuadran analisis SWOT.



Gambar 1. Kuadran Hasil SWOT

Berdasarkan perhitungan matriks SWOT, BPKAD berada pada Kuadran I (Strategi Agresif) dengan koordinat (1,00; 0,85), menunjukkan kondisi ideal dimana kekuatan internal ($1,70 > 0,70$) didukung peluang eksternal ($1,70 > 0,85$). Posisi ini memungkinkan penerapan strategi SO (Strengths-Opportunities) yang agresif:

Strategi Utama (SO):

1. Akselerasi digitalisasi dengan memanfaatkan keunggulan institusi dan dukungan regulasi
2. Pengembangan teknologi melalui kolaborasi eksternal
3. Optimalisasi sumber daya dengan adopsi teknologi terkini

Strategi Pendukung; WO berupa Peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur melalui pelatihan kolaboratif, ST berupa Penguatan keamanan data berbasis teknologi existing, WT berupa Mitigasi kendala internal terhadap ancaman eksternal

Implementasi strategi ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, menciptakan *public value* melalui layanan keuangan daerah yang lebih responsive. Dalam perspektif jangka panjang, pendekatan ini selaras dengan prinsip *e-government* dan *good governance* untuk mewujudkan pemerintahan yang inovatif dan akuntabel.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan di BPKAD Kabupaten Barito Selatan menunjukkan hasil yang beragam. Temuan ini sejalan dengan penelitian Avisha dkk. (2023) yang menyatakan bahwa transformasi digital di BPKAD Kabupaten Bogor juga menghadapi tantangan dalam mencapai efektivitas optimal. Sama halnya dengan temuan mereka, penelitian ini mengidentifikasi bahwa kendala infrastruktur teknologi, kesenjangan kompetensi SDM, serta masalah integrasi sistem masih menjadi

hambatan utama. Namun, penelitian ini lebih menekankan bahwa faktor dukungan kebijakan, kesiapan organisasi, dan kolaborasi eksternal secara keseluruhan menjadi elemen kunci yang mempengaruhi keberhasilan digitalisasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem SIPD dan SIMDA masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal stabilitas sistem dan keamanan data. Berbeda dengan temuan Paensi dkk. (2023) yang menemukan bahwa aplikasi E-Sumsel di Sumatera Selatan berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan secara signifikan berkat dukungan infrastruktur yang memadai. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun menggunakan platform digital serupa, tingkat keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan teknis dan kapasitas kelembagaan di masing-masing daerah.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Evangelista (2021), yang menunjukkan bahwa digitalisasi di BPKAD Lombok Barat menghadapi kendala dalam hal kesiapan SDM dan adaptasi teknologi. Penelitian ini menambahkan bahwa pendampingan berkelanjutan dan program pelatihan yang terstruktur menjadi penting untuk meningkatkan literasi digital pegawai. Sama halnya dengan penelitian Slamet dan Irmadiani (2022), penelitian ini menemukan bahwa resistensi terhadap perubahan dan budaya kerja yang belum sepenuhnya adaptif turut mempengaruhi proses transformasi digital. Namun, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan kolaboratif dengan akademisi dan pelaku industri teknologi, sebagai strategi inovatif dalam mempercepat adopsi sistem digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkaya diskursus akademis dengan menunjukkan bahwa efektivitas digitalisasi pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dukungan regulasi, serta perubahan budaya organisasi yang didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi strategis.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil penelitian, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Barito Selatan menghadapi empat tantangan utama: keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan kompetensi SDM, ketergantungan pada kebijakan pusat yang berubah, dan kendala anggaran. Infrastruktur yang belum optimal, seperti gangguan server dan koneksi internet tidak stabil, sering menghambat akses ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), terutama saat periode pelaporan keuangan. Selain itu, tidak semua pegawai mampu beradaptasi dengan sistem digital, terutama yang terbiasa dengan metode manual, sehingga menimbulkan ketergantungan pada tenaga teknis tertentu. Keterbatasan anggaran juga menjadi penghambat dalam pengembangan sistem, sementara perubahan kebijakan pusat sering kali memaksa penyesuaian teknis tanpa panduan yang jelas.

Untuk mengatasi hambatan ini, BPKAD telah mengambil langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan infrastruktur melalui penguatan server dan jaringan internet, pelatihan SDM secara berkala untuk meningkatkan literasi digital pegawai, serta koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi perubahan kebijakan. Selain itu, BPKAD juga menjalin kerja sama dengan universitas dan perusahaan teknologi untuk mendapatkan solusi inovatif yang hemat biaya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Barito Selatan telah menunjukkan arah positif namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dianalisis melalui empat aspek utama berdasarkan hasil studi SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Dari sisi kekuatan, BPKAD telah memiliki fondasi yang kuat berupa kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan regulasi daerah yang jelas. Sistem digital seperti SIPD dan SIMDA telah digunakan untuk mempercepat proses pencatatan dan pelaporan keuangan, sementara pelatihan yang diberikan kepada pegawai turut memperkuat kemampuan operasional. Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan anggaran juga memperkuat implementasi sistem digital secara berkelanjutan.

Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan signifikan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan digitalisasi ini. Gangguan teknis seperti server tidak stabil dan koneksi internet yang lambat masih sering terjadi, terutama saat masa pelaporan keuangan. Kompetensi SDM yang belum merata juga menimbulkan ketergantungan pada individu tertentu yang lebih menguasai teknologi. Selain itu, kesenjangan dalam integrasi sistem antara SIPD dan aplikasi pendukung menyebabkan redundansi kerja yang kontraproduktif.

Dari sisi peluang, BPKAD Barito Selatan memiliki momentum strategis untuk mempercepat transformasi digital melalui dukungan regulasi nasional seperti Perpres SPBE, kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti universitas dan penyedia teknologi, serta perkembangan teknologi mutakhir seperti big data analytics dan cloud computing. Peluang-peluang ini menciptakan ruang untuk penguatan sistem keuangan yang lebih adaptif dan cangguh.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi ancaman eksternal yang dapat menghambat kemajuan, seperti risiko keamanan siber, keterbatasan anggaran, ketergantungan terhadap pihak eksternal (terutama pengelola SIPD), serta resistensi perubahan dari sebagian pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara strategis BPKAD berada pada posisi yang kuat, keberlanjutan transformasi digital sangat bergantung pada strategi mitigasi risiko yang tepat dan responsif.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek kedalaman data dari masyarakat pengguna sistem, khususnya dalam mengukur dampak langsung digitalisasi terhadap kualitas layanan keuangan publik. Keterbatasan waktu dan biaya juga membatasi cakupan observasi dan triangulasi data yang lebih luas.

Arah Masa Depan Penelitian: Mengingat hasil temuan ini masih bersifat awal dan kontekstual, penulis merekomendasikan adanya penelitian lanjutan yang lebih luas dan mendalam, baik di Kabupaten Barito Selatan maupun di daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ke depan diharapkan dapat menguji efektivitas digitalisasi pengelolaan keuangan secara komparatif antar wilayah, serta menggali model implementasi digitalisasi

yang paling adaptif terhadap tantangan lokal dan perubahan teknologi yang terus berkembang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dan seluruh pihak yang membantu menyelesaikan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (1st ed.). Deepublish.
- Avisha, I., Slamet, B., & Wibowo, S. (2023). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor) Indrie Avisha 1), Budiman Slamet 2), Sujatmiko Wibowo3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama*. <https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/article/view/40/13>
- Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. *Jurnal Manajemen Pemerintahan (MP)*, 5(1), 35–41. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/446/271>
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Cahyani, A., Tiong, K., & Stephanie, S. (2024). Effectivity of e-Filing, e-SAMSAT, Tax Incentive on Online Electric Motorcycles Drivers' Tax Compliance in Indonesia. *2024 3rd International Conference on Creative Communication and Innovative Technology, ICCIT 2024, May*, 10701099. <https://doi.org/10.1109/ICCIT62134.2024.10701099>
- Evangelista, B. (2021). *Analisis Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Lombok Barat*. 11(2), 1–23. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOrPsYSEVo_KYL04hXNyoA;_ylu=Y29sbwNncT EEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1750580505/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.ojs.utmmataram.ac.id%2Findex.php%2Fsolid%2Farticle%2Fdownload%2F516%2Fpdf/RK=2/RS=Jq_AtzxhC_9kPK6coukevjcpxQY-
- Hikmawanti, F. (2020). *Metodologi Penelitian* (4th ed.). PT. Rajagrafindo Persada.
- Husna, A., Maryam, & Ikhbar, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 206–214. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/Konstruktivis/article/view/4704/3455>
- Jaradat, H., & Oudat, M. S. (2025). Enhancing clarity and transparency in Islamic financial practices: the role of regulatory influence. *Journal of Financial Reporting and Accounting, ahead-of-p*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2024-0479>
- Muhlisin, Subroto, W. T., & Sakti, N. C. (2025). How Impact Fiscal Decentralization to Sectoral Change and Local Inequality? *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(1), 379–389. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200134>
- Paensi, M., Mair, Z. R., Permatasari, I., & Jambak, M. I. (2023). Analisis Penggunaan Aplikasi E-Sumsel dalam Pembuatan Surat Tugas dan Taksasi SPPD Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Software Engineering and Computational Intelligence*, 1(2), 101–106. <https://doi.org/10.36982/jseci.v1i2.3575>
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta. <https://doi.org/978-602-7825-08-6>
- Slamet, B., & Irmadiani, N. D. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Bpkad Kabupaten Bogor). *Public Service and Governance Journal*, 3(1), 67–79. <https://doi.org/10.56444/psgi.v3i1.634>
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi.
- Zeini, N. T., & Okasha, A. E. (2025). Good governance: an empirical evidence from Egypt's public health sector. *International Journal of Health Governance*, 30(1), 16–31. <https://doi.org/10.1108/IJHG-07-2024-0093>